

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Achmad Roestandi, 2006, *Mahkamah Konstitusi dalam Tanya Jawab*, Jakarta, Konstitusi Press.
- Ahmad, dkk., 2024, *Buku Ajar Metode Penelitian & Penulisan Hukum*, Jambi, Sonpedia Publishing Indonesia.
- Ahmad Ziruddin, Kholilur Rahman, dan Mohammad Agus Maulidi, 2023, *Merawat Negara Hukum*, Bogor, Guepedia.
- Ardiansyah, 2022, *Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta, Deepublish.
- Asdar Nor, 2025, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta, CV Jejak (Jejak Publisher).
- Elidar Sari. *Ilmu Negara*. Lokseumawe, BieNaEdukasi, 2015.
- Fajlurrahman Jurdi, 2018, *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*, Jakarta, Kencana.
- Hamdan Zoelva, 2005, *Impeachment Presiden. Cet-1*, Jakarta, Konstitusi Press.
- Hanta Yuda Ar, 2013, *Presidensialisme Setengah Hati*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama.
- Hendra Budiman, 2018, *Skenario Pemakzulan Presiden Jokowi*, Jakarta, MediaPressindo.
- Ismail Nurdin, 2017, *Etika pemerintahan: Norma, konsep, dan praktek bagi penyelenggara pemerintahan*, Jakarta, Lintang Rasi Aksara Books.
- Jayus, 2019, *Hukum Pemilu & Alternatif Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilu*, Surabaya, Jakad Media Publishing.
- Jimly Asshiddiqie, 2021, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Kasman Bakry, 2025, *Hukum Tata Negara: Teori dan Penerapan Hukum Tata Negara di Negara Demokrasi: Teori dan Penerapan Hukum Tata Negara di Negara Demokrasi*, Jambi, PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- _____, 2024, *Sistem Politik Indonesia*, Jambi, Sonpedia Publishing Indonesia.
- Khairul Fahmi, 2013, *Dinamika Perlindungan Hak Konstitusional Warga; Mahkamah Konstitusi Sebagai Mekanisme Nasional Baru Pemajuan dan Perlindungan HAM*, Jakarta, Pustaka Masyarakat Setara.

Markus Gunawan, 2008, *Buku pintar calon anggota & anggota legislatif, DPR, DPRD & DPD*, Yogyakarta, Visimedia.

Muhammad Akbal dan Abdul Rauf, 2019, *Peran Mahkamah Konstitusi dalam Pembubaran Partai Politik*, Surabaya, Media Sahabat Cendekia.

Nessa Fajriyana Farda, dkk., 2024, *Hukum Lembaga Negara*, Padang, Gita Lentera.

Ridwan Syaidi Tarigan, 2024, *Konstitusi Dan Kekuasaan Studi Kasus Dalam Hukum Tata Negara*, Jakarta, Ruang Karya Bersama.

Sahya Anggara, 2013, *Sistem Politik Indonesia*, Bandung, Pustaka Setia.

Vishnu Juwono, 2018, *Melawan korupsi*, Jakarta, Kepustakaan Populer Gramedia.

Zainuddin Ali, 2021, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3)

Ketetapan MPR No. III Tahun 1978 tentang Hubungan Kerja Antar Lembaga Negara

C. Jurnal, Skripsi, dan Karya Ilmiah Lainnya

Abdul Rahman, 2017, "Pemakzulan Kepala Negara", *Diktum*, Vol. 5, No. 2

Adam Setiawan, Nehru Asyikin, Fatma Hidayati, dan Isnawati, 2023, "Impeachment Sebagai Bentuk Pertanggungjawaban Presiden Indonesia dalam Negara Hukum yang Demokratis", *Jatijajar Law Review*, Vol. 2, No. 2

Ahmad Yani, 2018, "Sistem Pemerintahan Indonesia: Pendekatan Teori dan Praktek Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945", *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, Vol. 12, No. 2

Andar Rujito, 2012, "Pengaturan Sistem Pemerintahan Indonesia Setelah Amandemen UUD 1945 (Studi Atas Kekuasaan Presiden)", *Skripsi*, Universitas Islam Indonesia

Andy Wiyanto, 2016, "Pemakzulan dan Pelaksanaan Mekanisme Checks and Balances dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia", *Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan*, Vol. 4, No. 1

- Anfal Kurniawan, 2023, "Kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam Mekanisme Impeachment: Studi Komparasi Negara Republik Indonesia dan Republik Federal Jerman", *Staatsrecht: Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam*, Vol. 3, No. 2
- Ardhan Ahmad Syauqi, "Komparasi Ligitimasi Konstitusional Proses Pemakzulan Presiden Soekarno Dan Presiden Abdurrahman Wahid Dalam Prinsip Checks and Balances Antar Lembaga Di Indonesia", *Skripsi*, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
- Azahwa, Syahdina Diva, Bintang Aura Mayesa, Angelia Stephanie Vadia, Huwayda Rahmania, Fadhia Chalisha Adzzahra, dan Restu Rahmawati, 2025, "Implikasi Sistem Presidensial dengan Konsep Multipartai Terhadap Stabilitas Politik di Indonesia Pada Pemilu 2024: Indonesia", *Indonesian Journal of Law and Justice*, Vol. 2, No. 4
- Belly Isnaeni, 2021, "Trias Politica dan Implikasinya dalam Struktur Kelembagaan Negara dalam UUD 1945 Pasca Amandemen", *Jurnal Magister Ilmu Hukum*, Vol. 6, No. 2
- Cora Elly Noviati, 2013, "Demokrasi dan sistem pemerintahan", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 10, No. 2
- Dafa Nayudhistira, 2024, "Telaah Norma Pelantikan Presiden Dan Wakil Presiden Dalam Peraturan Perundang-Undangan", *Skripsi*, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
- Dewi Mulyanti, 2018, "Mekanisme Pemberhentian Presiden dalam Sistem Pemerintahan Presidensial di Indonesia (Tinjauan Perbandingan Hukum di Negara Amerika Serikat, Filipina dan Sudan)", *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, Vol. 6, No. 2
- Dhanang Alim Maksum, 2015, "Tugas dan Fungsi Wakil Presiden di Indonesia", *Lex Crimen*, Vol. 4, No. 1
- Diniyanto, Ayon, 2024, "Pemakzulan Presiden di Negara Hukum", *Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan*, Vol. 15, No. 1
- Eko Noer Kristiyanto, 2013, "Pemakzulan Presiden Republik Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945", *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, Vol. 2, No. 3
- Erham, Aman Ma'arij, dan Gufran, 2024, "Diskursus Pembatasan Kekuasaan di Indonesia dalam Perspektif Konstitusi dan Konstitusionalisme", *Legalitas: Jurnal Hukum*, Vol. 16, No. 1
- Farand Kurnia Rosidi, 2019, "Problematika Yuridis Pengaturan Pemberhentian Presiden Menurut Pasal 7B UUDNRI Tahun 1945 "Studi Latar Belakang

Munculnya Pasal 7B UUDNRI Tahun 1945””, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Islam

Fauzan Saputra, 2020, "Kekuatan Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Hal Pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden", *Jurnal Hukum Sasana*, Vol. 6, No. 2

Fitri Ayuningtyas, Aynul Khusnah, dan Adelia Wahyuningtyas, 2023, "Efektivitas Undang-Undang Dasar Tahun 1945 terhadap mekanisme checks and balances dan pemakzulan presiden atau wakil presiden dalam perspektif hukum tata negara", *Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan*, Vol. 4, No. 2

Herman Bastiaji Prayitno, 2018, "Pemakzulan Terhadap Presiden dan Atau Wakil Presiden Ditinjau dari Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945", *Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, Vol. 10, No. 2

I. Gede Pantja Astawa, dan Firdaus Arifin, 2021, "Sengeketa Kewenangan Lembaga Negara di Mahkamah Konstitusi", *Refika Aditama*

I. Gusti Ngurah Santika, 2019, "Presidensialisme Dan Problematika Mekanisme Impeachment Presiden Dan/Atau Wakil Presiden Berdasarkan UUD 1945 Pasca Perubahan (Perspektif Pergulatan Hukum Dan Politik)", *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial*, Vol. 5, No. 1

Ivana Eka Kusuma Wardani, 2019, "Peran Mahkamah Konstitusi dalam Mengawal Prinsip Checks and Balances Terhadap Dewan Perwakilan Daerah di Indonesia", *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi*, Vol. 2, No. 1

Khairul Fahmi, 2010, "Prinsip Kedaulatan Rakyat Dalam Penentuan Sistem Pemilihan Umum Anggota Legislatif", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 7, No. 3

Lisdhani Hamdan Siregar, 2012, "Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pemakzulan Presiden dan/atau Wakil Presiden di Indonesia", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 9, No. 2

M. Laica Marzuki, 2010, "Pemakzulan Presiden/Wakil Presiden Menurut Undang-Undang Dasar 1945", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 7, No. 1

Mahfudz, Irkham, 2011, "Pemakzulan Dalam Uud 45 Pasca Mandemen Prespektif Fikih Siyasah", *Skripsi*, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Melisa Fitria Dini, 2019, "Implikasi Perubahan Sistem Pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden Di Indonesia Terhadap Pertanggungjawaban Dan Pemberhentian Presiden Dan Wakil Presiden Pasca Reformasi", *Skripsi*, Universitas Islam Indonesia

- Misranto, 2014, "Mahkamah Konstitusi dalam Konstruksi Sistem Peradilan Impeachment", *Perspektif*, Vol. 19, No. 3
- Mohamad Hidayat Muhtar, dkk, 2023, "Teori & Hukum Konstitusi: Dasar Pengetahuan dan Pemahaman serta Wawasan Pemberlakuan Hukum Konstitusi di Indonesia", *Sonpedia Publishing Indonesia*
- Moody Rizqy Syailendra, 2024, "Peran Konstitusi dalam Menjaga Prinsip Demokrasi dan Supremasi Hukum di Indonesia", *Multilingual: Journal of Universal Studies*, Vol. 4, No. 4
- Muhammad Ainul Yaqin, 2023, "Penerapan Kembali Garis-Garis besar Haluan Negara (GBHN) Sebagai Instrumen Pertanggungjawaban Dan Alasan Impeachment Presiden Dalam Sitem Ketata Negara Indonesia", *Skripsi*, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
- Muhammad Bahrul Ulum, 2010, "Mekanisme Pemakzulan Presiden dan/atau Wakil Presiden Menurut UUD 1945 (Antara Realitas Politik dan Penegakan Konstitusi)", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 7, No. 4
- Nyoman Mas Aryani, dan Bagus Hermanto, 2018, "Rekonstruksi Kejelasan Kedudukan Wakil Presiden dalam Kerangka Penguatan dan Penegasan Sistem Presidensiil Indonesia", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 15, No. 2
- Patar Yakup Cristopa Sigi, 2019, "Tugas dan Fungsi Wakil Presiden Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Menurut Pasal 4 Ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945", *Lex Administratum*, Vol. 7, No. 1
- Retno Saraswati, 2012, "Desain sistem pemerintahan presidensial yang efektif", *Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 41, No. 1
- Rio Muzani Rahmatullah, and Suci Flambonita, 2022, "Kewenangan Pemakzulan Terhadap Kepala Daerah Oleh Menteri Dalam Negeri", *Lex Lata*, Vol. 5, No. 3
- Rizki Habibah, 2019, "Pemakzulan (Impeachment) Presiden Republik Indonesia Berdasarkan undang-undang dasar 1945 ditinjau menurut perspektif fiqh siyasah", *Skripsi*, IAIN Padangsidimpuan
- Rupertus Arvinci Ngabut, and Ariawan Gunadi, 2024, "Dinamika Politik Hukum Keanggotaan Majelis Permusyawaratan Rakyat: Unikameralisme dalam Bayang-Bayang Sistem Bikameral", *Jurnal Hukum Lex Generalis*, Vol. 5, No. 10
- Sugiono Margi, 2019, "Kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam Kelembagaan Negara", *Jurnal Rechten: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, Vol. 1, No. 3

- Syaiful Anwar, dan Muhammad Eriton, 2022, "Analisis Terhadap Pembagian Kewenangan Antara Presiden Dengan Wakil Presiden Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia", *Limbago: Journal of Constitutional Law*, Vol. 2, No. 2
- Tazkir Harun Al-Rasyid Lating, 2024, "Proporsional Keanggotaan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Terhadap Proses Pemakzulan Presiden Dan/Atau Wakil Presiden Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945", *Skripsi*, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
- Tiara Anris Pratiwi, 2024, "Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Nomor: 24/Pid. Sus-Tpk/2020/Pn Jmb)", *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh
- Titik Triwulan Tutik, 2013, "Analisis Kedudukan dan Status Hukum Ketetapan MPR RI Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan", *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 20, No. 1
- Urwatul Wutsqah, dan Erham Erham, 2024, "Diskursus Pembatasan Kekuasaan di Indonesia dalam Perspektif Konstitusi dan Konstitusionalisme", *Jurnal Citizenship Virtues*, Vol. 4, No. 2
- Winarno Adi Gunawan, 2008, "Pemakzulan (Impeachment) Presiden Dalam Perspektif Hukum Tata Negara", *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 38, No. 3
- Zainal Arifin, 2020, "Analisis Yuridis Mekanisme Pemakzulan Presiden dan Wakil Presiden Menurut UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Setelah Perubahan)", *Jurnal Hukum*, Vol. 36, No. 1
- Zuhdi Arman, 2018, "Tinjauan Terhadap Sistem Multi Partai Dalam Sistem Pemerintahan Presidensial Di Indonesia Pada Era Reformasi", *Jurnal Cahaya Keadilan*, Vol. 6, No. 1